

## Etika dalam Asesmen Psikologi di Bidang Bimbingan Konseling

Crisfatika Yulianti \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [24010014115@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014115@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Asesmen psikologi merupakan bentuk pengumpulan data yang mampu membantu konselor dalam proses bimbingan untuk perkembangan diri siswa. Dalam program Bimbingan dan Konseling, asesmen psikologi dapat menjadi salah satu cara penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam perancangan program oleh lembaga pendidikan. Etika dalam melakukan asesmen psikologi menjadi aspek terpenting yang mendasar dalam diri konseli untuk mencapai hasil terbaik dari asesmen yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) atau kepustakaan yakni teknik pengumpulan data yang fokus utamanya menggunakan buku-buku atau literatur-literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep etika dalam melakukan asesmen psikologi di bidang Bimbingan dan Konseling yang meliputi, definisi asesmen psikologi, tujuan dan manfaat dalam asesmen psikologi dalam Bimbingan dan Konseling, makna etika dalam asesmen psikologi di bidang Bimbingan dan Konseling, peran konselor memberikan asesmen psikologi, upaya menjaga kerahasiaan hasil asesmen, tantangan dalam menjalankan etika dalam asesmen, dan Solusi dalam menjaga objektivitas dalam asesmen.

**Kata kunci:** Asesmen Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Etika

### Abstract

Psychological assessment is a form of data collection that can assist counselors in the guidance process for student self-development. In the Guidance and Counseling program, psychological assessment can be one of the assessment methods used to identify student needs in the design of programs by educational institutions. Ethics in conducting psychological assessments are the most important fundamental aspect for counselors to achieve the best results from the assessments conducted. This study uses a qualitative method with a literature review approach (*library research*), which is a data collection technique that primarily focuses on books or literature. The purpose of this study is to understand the concept of ethics in conducting psychological assessments in the field of Guidance and Counseling, including a brief history of psychological assessment, the definition of psychological assessment, the objectives and benefits of psychological assessment in Guidance and Counseling, the meaning of ethics in psychological assessment in the field of Guidance and Counseling, efforts to maintain the confidentiality of assessment results, challenges in implementing ethics in assessment, and solutions in maintaining objectivity in assessment.

**Keywords:** Ethics, Guidance and Counseling, Psychological Assessment

## PENDAHULUAN

Layanan tes psikologi dan pengukuran lainnya dalam program Bimbingan dan Konseling bukanlah kegiatan tanpa makna yang dilakukan untuk formalitas dan seadanya. Menurut para ahli seperti Welfel dan Bergin dalam Gladding (2015), kegiatan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai tertentu yang membimbing konselor dalam memahami apa yang baik untuk konseli dan bagaimana cara membantu konseli dengan benar. Jika konselor tidak memahami etika dan nilai-nilai yang berlaku, maka tujuan dalam membantu perkembangan dan kemandirian konseli justru berakibat buruk. Maka dari itu, konselor memiliki tanggungjawab dalam setiap tindakannya yang pastinya akan berpengaruh pada konseli (Wilcoxon et al dalam Gladding, 2015).

Peran konselor idealnya menganalisis setiap permasalahan konseli spesifik dan teliti. Konselor tidak diperkenankan terbutu-buru atau hanya menelaah inti dari permasalahan konseli tanpa memahami masalah secara luas dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk mengoptimalkan perkembangan konseli, diperlukan asesmen psikologis yang sesuai dengan

kebutuhan konseli. Karena itu, asesmen psikologi menjadi aspek yang penting bagi guru BK atau konselor untuk mencapai layanan yang efektif (Aji et al. 2020).

Program Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah sebaiknya melakukan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan konseli agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan konseli. Asesmen sangat bermanfaat untuk meringkas informasi penting tentang konseli, sehingga konselor bisa lebih cepat dan tepat dalam memahami masalah yang dihadapi. Program BK di sekolah harus disusun dan dikelola berdasarkan hasil asesmen dan need assessment, serta memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Hal ini penting karena need assessment (penilaian kebutuhan) sangat menentukan kualitas layanan yang akan diberikan. Pada akhirnya, konselor itu sendiri adalah kunci utama keberhasilan program BK. Tanpa konselor yang kompeten, program yang baik sekalipun bisa jadi tidak berjalan dengan maksimal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur merupakan metode penelitian untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber pustaka yang didapat kemudian dijadikan bahan studi literatur lalu disusun menurut kaidah penulisan ilmiah (Nuryana, dkk, 2019). Dengan berbagai literatur yang relevan dengan persoalan yang dibahas, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan dan peringkasan agar dapat dikaji sehingga menghasilkan substansi dari sumber literatur. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dan mengkaji sehingga dapat Menyusun konsep yang berhubungan dengan etika dalam asesmen psikologi di bidang Bimbingan dan Konseling.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan adalah usaha individu maupun lembaga yang terencana dengan proses yang Panjang dimana prosesnya dapat dilakukan sejak dalam kadungan (Baştemur & Uçar, 2022). Dalam bidang pendidikan di suatu lembaga biasanya guru menggunakan tes atau asesmen untuk mengukur prestasi siswa. Menurut Gabel (2013), ada 2 jenis asesmen, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Singkatnya, asesmen tradisional lebih mengarah pada prestasi dan akademik siswa, sedangkan asesmen alternatif berfokus pada perkembangan psikologis dan keterampilan siswa.

Dalam Bimbingan dan Konseling, asesmen psikologi sangat berperan penting dalam perkembangan konseli selain melakukan konseling. Asesmen psikologi dibagi menjadi 2, yaitu asesmen psikologi non-tes dan tes. Untuk asesmen tes memiliki beberapa Teknik yaitu, Daftar Cek Masalah (DCM), Alat Ungkap Masalah (AUM), sosiometri, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Sedangkan, Teknik-teknik asesmen tes, yaitu tes kepribadian, tes bakat dan minat, tes intelegensi, dan lainnya. Tentunya keduanya memiliki kegunaannya masing-masing, tes yang biasanya dipakai adalah tes psikologi atau asesmen psikologi dimana konseli dapat menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan konselor untuk mengetahui lebih dalam kemampuan mengenal kepribadian dan lingkungan konseli sehingga konseli dapat mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan, Teknik non-tes biasanya lebih pada hubungan interpersonal konseli dengan lingkungannya.

Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata Ethos yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, dan sikap. Dapat dijelaskan bahwa etika menggambarkan filsafat moral yaitu pemikiran dan kebiasaan yang baik yang seharusnya dilakukan manusia (Pedhu, 2020). Menurut Bertens (2004), etika memiliki arti pemikiran kritis mengenai ajaran moral yang mana nilai-nilai umum, prinsip dasar, dan aturan-aturan tertentu dapat dilakukan untuk melakukan sesuatu. Etika dapat membantu seseorang memiliki pandangan mengenai ajaran moral secara kritis dan dapat mengarahkan hidup seseorang untuk bertindak lebih bijak dan dapat diterima oleh banyak orang.

Dalam kegiatan layanan asesmen di bidang Bimbingan dan Konseling bukanlah hal yang dinilai seadanya tanpa adanya kode etik atau nilai-nilai tertentu, yang dapat diartikan bahwa

asesmen tes maupun non-tes memegang erat peran kode etik atau etika dan menjadikan kode etik sebagai bagian paling penting dalam memberikan layanan pada konseli (Welfel dalam Gladding, 2015). Kode etik adalah norma dan aturan perilaku profesional yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggota profesi, termasuk konselor. ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) menekankan bahwa kode etik dapat mencegah malpraktik dan melindungi konseli dari penyalahgunaan profesi.

Kode etik memiliki fungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi sebagai konselor dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan layanan (Pedhu, 2020). Kode etik berperan bagaikan kompas moral yang memberi petunjuk atau arah yang benar dalam menjalankan profesi untuk membentuk citra yang baik di mata publik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Fisher (2016) dimana disebutkan bahwa kode etik dapat memberi pandangan atau identitas suatu profesi, menjadi standar perilaku yang dapat mengarahkan konselor dalam menjalankan profesi, dan membantu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai citra konselor. Hal ini penting untuk diperhatikan karena profesi konselor memiliki tiga pilar, yaitu kompetensi, profesionalisme, dan kepercayaan (Levin & Bickett, 2011).

Dalam mewujudkan keputusan yang etis, konselor harus memiliki prinsip beneficence (memberi manfaat dan mencegah kerugian konseli), nonmaleficence (menghindari tindakan yang membahayakan konseli), autonomy (menghormati keputusan konseli), justice (memberi perlakuan yang adil), fidelity (profesional dan bertanggungjawab). Swanson (dalam Gladding, 2015:73) juga menyusun pedoman mengenai etika konselor, yaitu kejujuran dan profesionalitas, berfokus pada kebaikan konseli, patuh terhadap kode etik profesi.

Pada saat melaksanakan asesmen psikologi, konselor sering kali menghadapi permasalahan etis. Situasi yang terjadi dapat menimbulkan dilema dalam menyalahkan atau membenarkan sesutau. Maka dari itu, konselor perlu memahami betul etika yang harus diterapkan untuk mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan kode etik profesi. Pemahaman dan penerapan kode etik ini dapat mencerminkan kualitas konselor dalam menghadapi bergai permasalahan dan dilema dalam melakukan asesmen, dimana konselor dapat mempertimbangkan segala tindakan dengan matang dan penuh tanggungjawab.

Berdasarkan ABKIN, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dalam pelaksanaan asesmen terkait rekaman data konseling yaitu melakukan beberapa izin pada konseli, yaitu izin merekam, izin pengamatan, tujuan merekam, penyimpanan rekaman. Dapat dimengerti bahwa untuk menjaga kerahasiaan memerlukan keterbukaan terhadap konseli mengenai maksud dan tujuan dari segala tindakan konselor, sehingga dapat melindungi hak konseli dan kepercayaan konseli dapat meningkat.

Umumnya, konselor boleh melakukan tes psikologi untuk membantu proses konseling agar konselor lebih mudah memahami dan memperjelas permasalahan yang dihadapi konseli. Tes psikologi juga dapat membantu konselor untuk melakukan penilaian secara objektif dan sistematis sehingga dapat memutuskan pemberian rancangan layanan yang tepat (Oluwatosin, 2018). Jika tidak mempersiapkan layanan dengan baik dan sistematis, maka akan riskan untuk malpraktek, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses konseling untuk tetap menjaga kepercayaan dan keberhasilan proses konseling yang membangun mental konseli. Berbagai kekhawatiran pasti terjadi ketika melakukan proses konseling, terlebih lagi ketika menggunakan tes psikologi. Jika konselor kurang kompeten dan tidak memahami hasil tes, maka adanya tes psikologi yang diberikan menjadi tidak berguna. Hal ini menjadi masalah dalam tes psikologi, yaitu ketika konselor tidak memiliki pengetahuan untuk menggunakan dan memaknai isi dan respon konseli dari tes psikologi.

Dalam layanan Bimbingan dan Konseling, penggunaan tes psikologi tidak lepas dari berbagai kritik dan tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya bias

budaya dalam tes. Hal ini dapat diartikan bahwa beberapa alat tes dibuat berdasarkan nilai, norma, atau cara berpikir dari satu budaya tertentu, sehingga menjadi kesulitan konselor dalam menggunakan tes untuk wilayah lain yang memiliki budaya yang berbeda dan jika tetap digunakan bisa merugikan individu dari latar belakang budaya lain, terutama kelompok minoritas. Tes juga sering dianggap mengukur kemampuan yang tidak sesuai dengan diri konseli, seperti keahlian yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam konteks tertentu, atau bahkan mengganggu privasi konseli.

Setiap melakukan tes psikologi, ada beberapa hal yang menjadi penghambat atau tantangan bagi konselor adalah jika tes dipalsukan oleh individu yang ingin memberikan kesan tertentu, dan hal ini terkadang justru hasil yang tidak sesuai dengan karakter dan keahlian individu terutama dalam perekrutan karyawan di sebuah perusahaan yang menimbulkan persiangan tidak sehat, alih-alih membantu pertumbuhan individu, namun berujung merugikan perusahaan karena tidak sesuai dalam kriteria pekerja yang dibutuhkan (Hood dan Johnson dalam Gladding, 2015).

Elmore dan rekan-rekannya, mengingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada hasil tes, tanpa mempertimbangkan informasi lain tentang individu, dapat menyebabkan penyalahgunaan yang serius. Masalah ini sangat terasa ketika tes digunakan pada kelompok minoritas, yang seringkali mengalami ketidakadilan karena alat tes tidak memperhatikan pengalaman hidup dan latar budaya mereka (Suzuki, Meller, dan Ponterotto dalam Gladding, 2015). Bahkan, Oakland menyebutkan bahwa bagi beberapa siswa dari kelompok budaya tertentu, pengalaman mengikuti tes bisa terasa tidak manusiawi, dan hasil tes tersebut bisa membuat mereka menjalani program pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, berbagai lembaga seperti AACE dan ACA telah membuat pedoman etika dan standar asesmen multikultural, agar tes dapat digunakan secara adil, tepat, dan menghargai keberagaman budaya (Hansen dalam Gladding, 2015). Dengan demikian, penting bagi konselor untuk tidak hanya mengandalkan tes, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan informasi lain tentang individu yang sedang dibimbing.

Dalam layanan Bimbingan dan Konseling, konselor perlu memiliki pengetahuan dan kepekaan yang tinggi dalam memilih serta menafsirkan tes psikologi yang digunakan (Pedhu, 2020). Hal ini sangat penting karena hasil tes akan menjadi dasar dalam memahami permasalahan, potensi, serta kebutuhan klien. Oleh karena itu, setiap instrumen tes psikologi yang digunakan harus berdasarkan sumber ilmiah yang kuat, yaitu validitas (alat benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur) dan reliabilitas (alat memberikan hasil yang konsisten). Penggunaan instrumen yang memakai aturan atau norma yang tidak jelas sangat berisiko menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil tes, yang bisa merugikan klien baik secara psikologis maupun dalam proses bimbingan. Maka, konselor harus sangat berhati-hati dalam menyeleksi alat tes. Dalam memilih tes, konselor juga perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti tujuan asesmen, karakteristik klien, konteks pelaksanaan, serta keterbatasan yang dimiliki, termasuk latar belakang budaya dan bahasa. Dengan begitu, proses asesmen tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga bermanfaat dan etis, serta mampu memberikan arah yang tepat dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling.

Dalam asesmen psikologi, terdapat beberapa tema penting yang dapat membantu konselor dalam menjalani profesi sesuai kode etik untuk menjaga objektivitas asesmen, antara lain:

1. Kompetensi profesional dan pelatihan

Konselor atau profesional yang terlibat dalam penggunaan tes harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, agar dapat memilih, memberikan, menilai, dan menafsirkan hasil tes dengan benar. Hal ini sangat penting karena setiap jenis tes memiliki tingkat kesulitan dan kebutuhan keahlian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kualifikasi pengguna tes

sangat ditekankan, yaitu kombinasi dari pengetahuan, pelatihan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan agar seseorang dinilai layak menggunakan suatu tes (APA, 2000). Seorang profesional perlu memahami berbagai konsep dasar pengukuran seperti skala pengukuran, jenis-jenis reliabilitas dan validitas, serta norma-norma tes. Profesional juga wajib membaca dan memahami manual tes, serta mengikuti dengan tepat semua prosedur dalam pelaksanaan, penilaian, dan interpretasi tes. Tanpa kompetensi ini, penggunaan tes bisa keliru dan berdampak negatif pada konseli. Karena itu, pelatihan yang tepat dan pemahaman mendalam menjadi syarat utama dalam memastikan asesmen dilakukan secara etis, akurat, dan bertanggung jawab.

## 2. Kesejahteraan konseli

konselor harus memikirkan perasaan dan hak klien sebelum memilih dan memberikan tes. Kadang-kadang, tes bisa membuat klien tidak nyaman karena menyangkut hal-hal pribadi, seperti masalah keluarga atau kesehatan mental. Oleh karena itu, sebelum melakukan tes, konselor wajib menjelaskan tujuan tes dan meminta izin dari klien. Hal ini disebut informed consent atau persetujuan yang sadar.

Contohnya, jika seorang konselor ingin memberikan tes kepribadian kepada siswa SMA, konselor harus terlebih dahulu menjelaskan isi dan tujuan tes tersebut. Misalnya: "Tes ini akan membantu kita memahami bagaimana kamu berpikir dan merasa, agar saya bisa mendampingi kamu dengan lebih baik. Hasilnya hanya akan saya simpan, kecuali kamu setuju untuk membagikannya ke guru atau orang tua."

Selain itu, jika hasil tes akan dibagikan ke guru atau orang tua, maka konselor harus meminta izin tertulis dari klien. Misalnya, konselor bisa berkata: "Apakah kamu setuju jika saya sampaikan hasil tes ini ke wali kelasmu agar kita bisa mendiskusikan dukungan yang lebih tepat untukmu?"

Dengan cara ini, konselor menunjukkan bahwa ia menghormati hak dan privasi klien, serta bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Asesmen psikologi merupakan alat bantu penting dalam proses konseling karena dapat membantu konselor memahami permasalahan konseli secara sistematis dan objektif. Namun, jika tidak digunakan dengan tepat, tes bisa menimbulkan malpraktik. Salah satu tantangan utama adalah ketika konselor tidak memiliki kompetensi dalam menggunakan atau menafsirkan hasil tes. Ini bisa menyebabkan informasi yang didapat menjadi tidak berguna, atau bahkan menyesatkan. Dalam pelaksanaan asesmen psikologi, konselor sering menghadapi berbagai tantangan etis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kode etik menjadi sangat penting agar konselor dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Kode etik ini mencerminkan kualitas profesional konselor dalam menangani dilema, termasuk menjaga kerahasiaan data konseling seperti rekaman, pengamatan, serta tujuan penggunaannya. Kepercayaan konseli juga dapat meningkat jika konselor transparan dan meminta izin dengan jelas.

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktik bimbingan dan konseling agar pelaksanaan asesmen berjalan secara etis dan efektif. Pertama, konselor harus memiliki kompetensi profesional yang memadai, termasuk pemahaman tentang konsep dasar pengukuran, jenis-jenis reliabilitas dan validitas, serta kemampuan membaca dan menafsirkan manual tes dengan benar. Kedua, konselor wajib mengutamakan kesejahteraan konseli dengan menjelaskan tujuan asesmen secara terbuka dan meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tes, yang dikenal sebagai informed consent. Ketiga, pemilihan tes harus mempertimbangkan kesesuaian budaya dan konteks konseli, karena tidak semua alat tes cocok untuk semua latar belakang. Keempat, konselor tidak boleh hanya bergantung pada hasil tes sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Tes harus

dipadukan dengan informasi lain seperti wawancara, observasi, dan data tambahan agar proses konseling menjadi lebih menyeluruh, akurat, dan bermanfaat bagi perkembangan konseli.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Aji, Selo, B., Nurpitasari, E., Hanum, N. C., Akbar, A. A., & Bhakti, C. P. 2020. "Pengembangan Asesmen Berbasis Teknologi Untuk Keberlangsungan BK Ditengah Pandemi Covid-19." Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020 "Penggunaan Asesmen Dan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru" 98-103.
- Ardi, Z. (2022). Buku Ajar Asesmen dalam Konseling.
- Asmita, W., & Fitriani, W. (2022). Analisis konsep dasar assesmen bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 129-134.
- Baştemur, Ş., & Uçar, S. (2022). Mixed method research on effective psychological counselor characteristics and empowerment needs of turkish school counselors. *Participatory Educational Research*, 9(1), 1-21. doi:10.17275/PER.22.1.9.1
- Gladding, S. T. (2015). *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Terjemahan P. M. Winarno dan Lilian Yuwono. Jakarta: PT Indeks.
- Levin, M.M., & Buckett, A. (2011). Discourses regarding ethical challenges in assessments-Insights through a novel approach. *SA Journal of Industrial Psychology*. 37(1), 1-13.
- Pedhu, Y. (2020, December). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 85-97).
- Pratiwi, T. I., Khusumadewi, A., & Triardyanti, A. W. (2024). *Asesmen Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling*. Academia Publication.
- Safithry, E. A. (2018). *Asesmen teknik tes dan non tes*. IRDH.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 14 (2), 69-77.
- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.